



## Analisis KR Rekonsiliasi

Tunjung Sulaksono

**SIMPOSIUM** Nasional Membedah Tragedi 1965: Pendekatan Kesejarahan, memang telah usai digelar lebih sebulan yang lalu. Akan tetapi panasnya situasi pascaforum yang mempertemukan korban dan pelaku tragedi berdarah 1965 untuk pertama kali dalam sejarah masih terasa hingga hari ini. Apalagi rekomendasi akhir untuk Presiden Jokowi masih dalam tahap penyusunan oleh tim simposium yang dipimpin anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto. Sementara rekomendasi belum usai disusun, ruang debat mengenai *quo vadis* isu rekonsiliasi nasional masih sangat terbuka, dan nampaknya akan selalu terbuka.

Letnan Jenderal (Purn) TNI Agus Widjojo, Gubernur Lemhanas yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Pengarah Simposium ini menyatakan, dalam proses rekonsiliasi, penguatan kepada publik dan penyelesaian tragedi 1965 merupakan langkah penting dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Simposium menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat, bahwa ada pendapat berbeda, dan supaya kita belajar dan memecahkan mitos masa lalu bahwa masing-masing kelompok merasa benar. Akan tetapi tidak semua setuju dengan pendapat Agus. Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat

\* Bersambung hal 7 kol 1

## Rekonsiliasi . . . . . Sambungan hal 1

Letjen Suryadi misalnya, justru menyatakan kegamangannya tentang penyelenggaraan simposium tersebut, dan mempertanyakan bagaimana bisa orang yang memberontak difasilitasi. Priyanto, mantan Wagub DKI yang juga purnawirawan TNI juga menyayangkan simposium tersebut. Baginya, tidak perlu ada pelurusan sejarah karena sejarah sudah lurus.

Perdebatan juga merembet ke kabinet yang menunjukkan tidak kompaknya elite pemerintahan dalam menanggapi isu rekonsiliasi ini. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, justru menggelar silaturahmi bersama organisasi Forum Umat Islam (FUI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta Selatan 13 Mei lalu. Meski dikemas dalam forum untuk merespons kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), akan tetapi secara eksplisit isi dari forum ini salah satunya adalah membahas Simposium Nasional 1965. Ryamizard secara terbuka mengkritisi forum simposium tersebut dan menolak pendapat Menkopolkam Luhut Binsar Pandjatan tentang perlunya pembentukan Tim Pencari Kuburan Massal. Menhan menilai, pembongkaran makam tersebut justru akan memunculkan konflik baru yang justru kontraproduktif dengan situasi bangsa yang sudah kondusif saat ini.

Tragedi 1965, apapun nama dan cara penyebutannya, menjadi salah satu persoalan bangsa yang tak kunjung usai. Setiap upaya penyelesaiannya selalu memantik polemik tak berkesudahan. Rekonsiliasi terhadap korban peristiwa 30 September 1965 nampaknya akan menjadi pilihan pemerintah. Penyelenggaraan symposium April 2015 lalu menunjukkan dukungan pemerintah. Akan tetapi implementasi dari rekonsiliasi tersebut yang menuai pro-kontra luar biasa. Apalagi ketika tahun lalu Jaksa Agung Prasetyo mengatakan bahwa permintaan maaf kepada para korban tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tahap rekonsiliasi. Maka penolakan rekonsiliasi di kalangan masyarakat menjadi demikian masif.

Sebenarnya rekonsiliasi itu, apapun bentuknya, tanpa disadari dan tanpa hiruk pikuk, telah berjalan secara alami dalam bangsa ini. Meskipun apa yang sebenarnya terjadi masih merupakan tanda tanya besar, akan tetapi semua pihak menyadari bahwa peristiwa itu merupakan pengalaman yang luar biasa pahit dalam menjalani hidup dalam ikatan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satu pun anak bangsa ini

gi. Karena itulah, tanpa perlu seremoni dan tanpa hingar bingar pun, upaya rekonsiliasi sudah terjadi.

Justru setiap upaya dari sebagian elite negeri ini untuk mengkonstruksi rekonsiliasi bisa jadi hanya akan mencabik jalinan rekonsiliasi alamiah yang telah terajut di kalangan masyarakat. Realita ini bahkan akan rawan digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan isu tersebut untuk menjadi komoditi politik bagi kepentingan-kepentingan sesaat dan subjektif mereka. (Penulis adalah Dosen Ilmu Pemerintahan UMY dan peneliti Inspekt)-a